

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Menurut *A Guide to to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK)* proyek merupakan pekerjaan yang bersifat temporer yang dikerjakan untuk menciptakan produk atau pelayanan yang memiliki keunikan. Sifat proyek yang temporer atau sementara, menghasilkan durasi dalam pengerjaan proyek tersebut. Selain itu, proyek dapat dikatakan berakhir atau selesai, ketika pengerjaannya sudah siap untuk dikirimkan kepada *customer*. Dalam proyek, dapat melibatkan satu individu, kelompok hingga organisasi yang dilakukan di semua tingkatan. Proyek mengalami elemen berulang dalam beberapa aktivitas proyek, seperti pembangunan gedung, jalan, perkantoran, hingga proyek tentang IT. Akan tetapi, setiap proyek tetap memiliki karakteristik utama dalam pengerjaannya seperti lokasi, desain, lingkungan, hingga orang-orang yang terlibat (Project Management Institute, 2017).

Menurut publikasi yang dirilis oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur di Indonesia. Setelah peraturan itu ditetapkan, terdapat perubahan sebanyak tiga kali dan penambahan untuk Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan Peraturan Presiden Nomo 109 Tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Sementara itu, Peraturan Presiden tersebut ditunjang dengan Permenko Menteri Koordinator Perekonomian nomor 9 tahun 2022, mengenai terdapat 200 proyek dan 12 program sebagai Proyek Strategis Nasional dengan estimasi total nilai investasi sebesar Rp 5.481.400.000.000 yang tersebar di seluruh kawasan Indonesia.

Berdasarkan **Permenko Nomor 9 Tahun 2022**, terdapat **200 Proyek** dan **12 Program** sebagai PSN dengan **estimasi total nilai investasi Rp 5.481,4 Triliun**



Gambar I. 1 Proyek Strategis Nasional

Sumber: (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, n.d.)

Pada gambar I. 1 menunjukkan bahwa terdapat persebaran proyek dan program dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tersebar di seluruh kawasan di Indonesia. Program tersebut meliputi akses *exit tol*, *smelter*, ketenagakerjaan, penyediaan pangan, pemerataan ekonomi, instalasi pengolahan sampah, kawasan strategi pariwisata, kawasan pembatasan, *superhub*, pengembangan wilayah, kawasan ekonomi khusus, dan industri gula dan sawit. Pada sektor proyek, meliputi pembangunan jalan, bendungan & irigasi, kawasan, perkebunan, kereta api, energi, pelabuhan, air bersih & sanitasi, bandar udara, pariwisata, perumahan, Pendidikan, tanggul pantai, dan teknologi. Dari data tersebut, menunjukkan bahwa proyek konstruksi mengambil peran penting dalam pembangunan yang dilakukan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Selain Proyek Strategis Nasional (PSN), pembangunan yang membutuhkan kucuran dana yang tidak sedikit nominalnya ialah pada sektor Desa. Pagu Dana Desa pada tahun 2022 telah ditetapkan sebesar 68 triliun rupiah untuk dialokasikan kepada 74.960 desa. Dana tersebut menurun sebesar 4 triliun rupiah dibandingkan Pagu Dana Desa pada tahun 2021. Alokasi dana desa tersebut diperuntukkan untuk

membangun berbagai infrastruktur di desa seperti jalan desa, embung, irigasi, jembatan, pasar desa, fasilitas air bersih, drainase, sumur, dan sejumlah infrastruktur lainnya (Kementerian Keuangan RI, n.d.).

Tabel I. 1 Rekap Dana Desa Nasional (per provinsi) tahun 2022

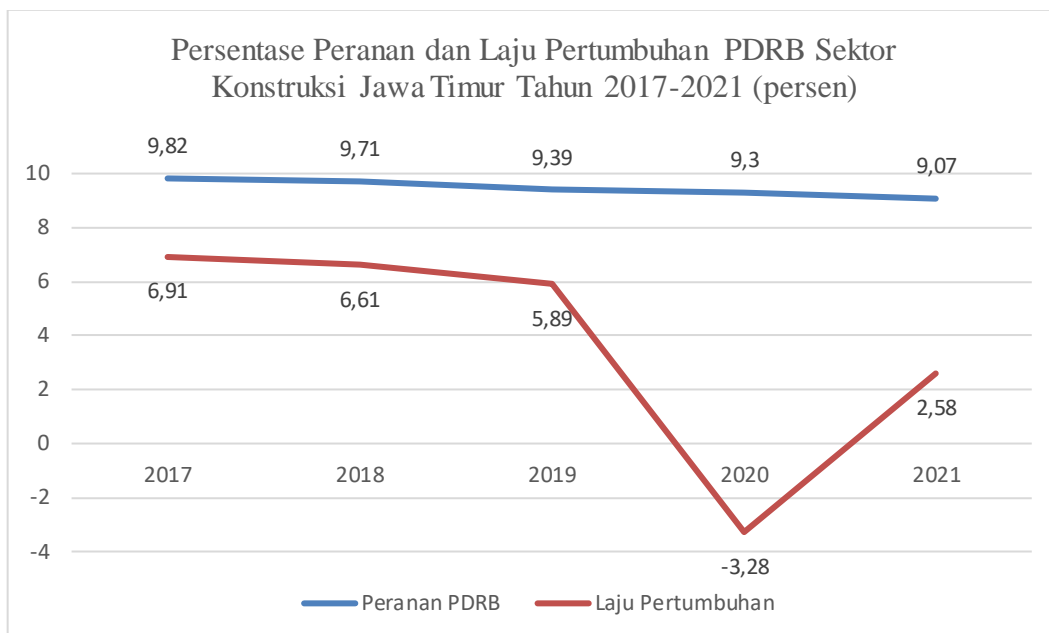
Sumber: (Kementerian Desa, n.d.)

| No | Wilayah / Lokasi | Jumlah Desa | Pagu Anggaran (Rupiah) | Total Penyaluran ke RKD (Rupiah) | Persentase Total Penyaluran |
|----|---------------------------|-------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Aceh | 6497 | 4,669,371,747,000 | 4,428,285,354,365 | 98.04% |
| 2 | Sumatera Utara | 5417 | 4,396,783,707,000 | 4,217,051,167,975 | 98.18% |
| 3 | Sumatera Barat | 928 | 867,021,982,000 | 865,831,614,900 | 99.86% |
| 4 | Riau | 1591 | 1,400,296,630,000 | 1,351,641,936,622 | 98.36% |
| 5 | Jambi | 1399 | 1,122,379,666,000 | 1,113,054,488,224 | 99.17% |
| 6 | Sumatera Selatan | 2853 | 2,554,850,714,000 | 2,529,148,880,643 | 98.99% |
| 7 | Bengkulu | 1341 | 1,009,277,210,000 | 972,321,296,046 | 98.60% |
| 8 | Lampung | 2435 | 2,326,825,408,000 | 2,305,082,833,041 | 99.07% |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | 309 | 274,419,601,000 | 273,273,583,600 | 99.58% |
| 10 | Kepulauan Riau | 275 | 209,142,722,000 | 202,432,617,666 | 96.79% |
| 11 | Jawa Barat | 5312 | 6,131,237,698,000 | 6,124,995,116,207 | 99.90% |
| 12 | Jawa Tengah | 7809 | 8,116,178,993,000 | 8,083,282,210,542 | 99.59% |
| 13 | D. I. Yogyakarta | 392 | 439,265,764,000 | 439,206,136,000 | 99.99% |
| 14 | Jawa Timur | 7724 | 7,760,089,489,000 | 7,738,316,258,455 | 99.72% |
| 15 | Banten | 1238 | 1,226,533,612,000 | 1,222,891,714,960 | 99.70% |
| 16 | Bali | 636 | 600,720,887,000 | 600,601,362,200 | 99.98% |
| 17 | Nusa Tenggara Barat | 1005 | 1,194,497,788,000 | 1,192,044,830,800 | 99.79% |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | 3026 | 2,805,512,355,000 | 2,736,462,327,882 | 97.54% |
| 19 | Kalimantan Barat | 2031 | 1,893,811,927,000 | 1,825,485,832,050 | 98.47% |
| 20 | Kalimantan Tengah | 1432 | 1,204,445,622,000 | 1,133,526,522,778 | 97.83% |
| 21 | Kalimantan Selatan | 1864 | 1,426,505,484,000 | 1,389,220,238,110 | 97.39% |

| No | Wilayah / Lokasi | Jumlah Desa | Pagu Anggaran (Rupiah) | Total Penyaluran ke RKD (Rupiah) | Persentase Total Penyaluran |
|----|-------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 22 | Kalimantan Timur | 841 | 760,299,025,000 | 746,853,797,483 | 103.96% |
| 23 | Kalimantan Utara | 447 | 390,181,886,000 | 318,598,266,480 | 99.58% |
| 24 | Sulawesi Utara | 1507 | 1,088,499,252,000 | 1,068,949,733,229 | 98.20% |
| 25 | Sulawesi Tengah | 1842 | 1,478,548,231,000 | 1,429,117,475,764 | 98.48% |
| 26 | Sulawesi Selatan | 2255 | 2,117,144,808,000 | 2,110,603,775,903 | 99.69% |
| 27 | Sulawesi Tenggara | 1908 | 1,464,086,194,000 | 1,422,380,047,008 | 97.93% |
| 28 | Gorontalo | 657 | 563,132,319,000 | 546,379,559,996 | 98.67% |
| 29 | Sulawesi Barat | 575 | 522,407,219,000 | 512,910,573,800 | 98.18% |
| 30 | Maluku | 1198 | 1,004,639,193,000 | 944,188,591,724 | 96.93% |
| 31 | Maluku Utara | 1063 | 821,111,942,000 | 760,461,717,112 | 96.55% |
| 32 | Papua | 5411 | 4,797,007,421,000 | 4,721,117,735,643 | 98.42% |
| 33 | Papua Barat | 1742 | 1,363,773,504,000 | 1,286,053,051,134 | 97.42% |
| | | 74960 | 68,000,000,000,000 | 66,611,770,648,342 | 98.80% |

Berdasarkan tabel data tersebut, Provinsi dengan perolehan Pagu Dana Desa terbesar ialah pada Provinsi Jawa Tengah, dengan nominal Rp 8.116.178.993.000. Hal tersebut dikarenakan jumlah desa terbanyak ialah juga berasal dari Jawa Tengah, dengan total jumlah 7809 desa. Diurutan kedua, perolehan Pagu Dana Desa terbesar ialah Provinsi Jawa Timur, dengan nominal Rp 7.760.089.489.000. Provinsi Jawa Timur, juga menduduki provinsi kedua dengan jumlah terbanyak sebesar 7724 desa, di bawah Provinsi Jawa Tengah.

Pada tahun 2021 khususnya di Jawa Timur, bidang konstruksi merupakan penyumbang perekonomian yang cukup besar sebesar 9,07 persen dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2021, pp. 13-14).



Gambar I. 2 Persentase Peranan dan Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Konstruksi Jawa Timur tahun 2017 – 2021 (dalam persen)

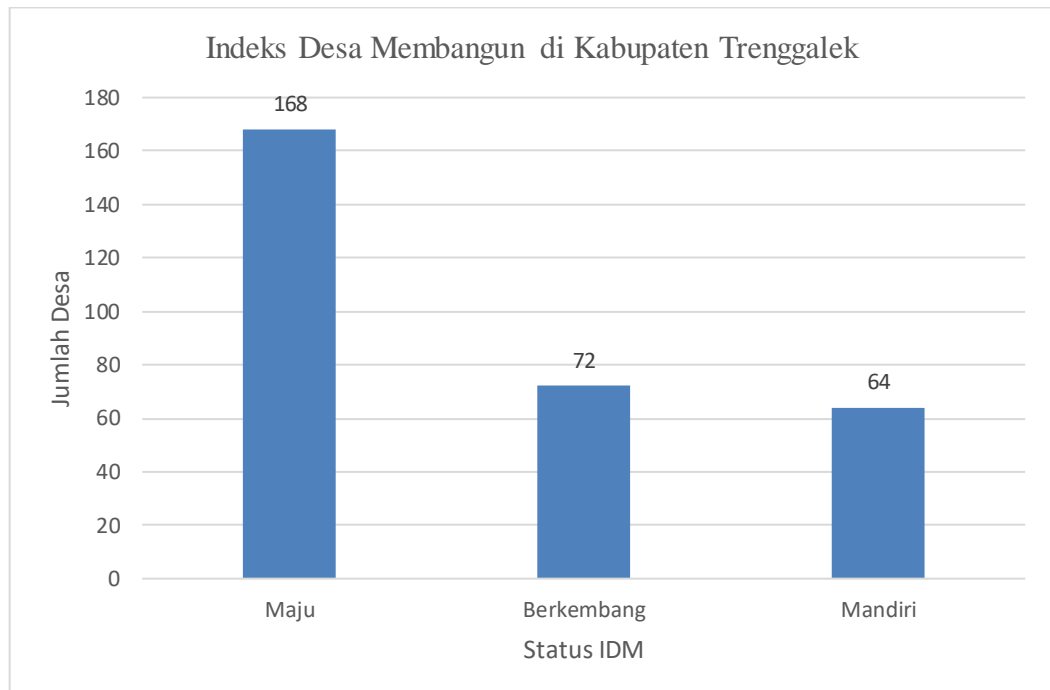
Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2021)

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (2020), Indeks Desa Membangun (IDM) dapat mendokumentasikan perkembangan kemandirian desa berdasarkan Implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun (IDM) dapat mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Pada sektor Daerah, khususnya Kabupaten Trenggalek, melalui publikasi dalam satu data statistik sektoral, memaparkan statistik Indeks Desa Membangun di Kabupaten Trenggalek. Indeks Desa Membangun (IDM), akan mempengaruhi Status Indeks Desa Membangun (IDM) untuk menentukan klasifikasi status kemajuan dan kemandirian desa. Adapun, status Indeks Desa Membangun (IDM) tersebut ialah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, n.d.):

1. Desa Mandiri atau Sangat Maju (Desa Sembada), dengan nilai indeks lebih besar dari 0,8155.

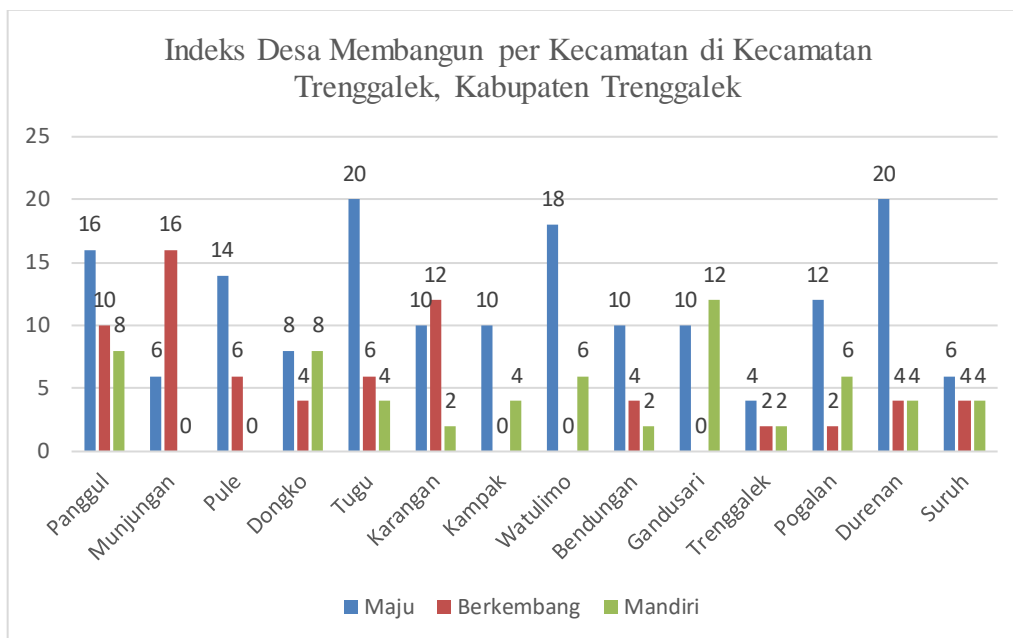
2. Desa Maju (Desa Pra-Sembada, dengan nilai indeks kurang dari dan sama dengan 0,8155 dan lebih besar dari 0,7072.
3. Desa Berkembang (Desa Madya), dengan nilai indeks kurang dan sama dengan 0,7072 dan lebih besar dari 0,5989.
4. Desa Tertinggal (Desa Pra-Madya), dengan nilai indeks kurang dari dan sama dengan 0,5989 dan lebih besar dari 0,4907.
5. Desa Sangat Tertinggal (Desa Pratama), dengan nilai indeks kurang dan lebih kecil dari 0,4907.



Gambar I. 3 Indeks Desa Membangun di Kabupaten Trenggalek tahun 2022

Sumber: (Satu Data Kabupaten Trenggalek, n.d.)

Pada gambar 1. 3, menjelaskan dalam Indeks Desa Membangun di Kabupaten Trenggalek bahwa status Indeks Desa Membangun (IDM) pada Desa Maju berjumlah 168, Desa Berkembang berjumlah 72, dan Desa Mandiri berjumlah 64. Dengan demikian, desa-desa di Kabupaten Trenggalek masih terhitung lebih banyak Desa Berkembang dan Maju, dibandingkan dengan Desa Mandiri.



Gambar I. 4 Indeks Desa Membangun per Kecamatan tahun 2022

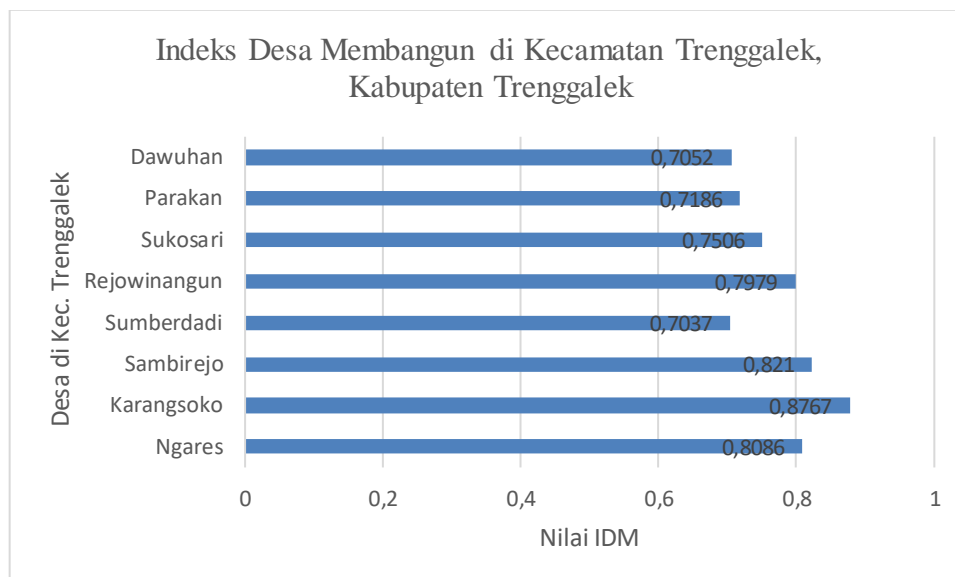
Sumber: (Satu Data Kabupaten Trenggalek, n.d.)

Sementara itu, pada gambar I. 4 menjelaskan Indeks Desa Membangun per Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, menunjukkan ketimpangan antara Indeks Desa Membangun (IDM) pada Desa Maju, Berkembang dan Mandiri. Pada statistik data tersebut, menunjukkan bahwasannya desa dengan status Maju dan Berkembang masih menunjukkan rata-rata terbanyak untuk per Kecamatan.

Tabel I. 2 Nilai Indeks Desa Membangun di Kecamatan Trenggalek tahun 2022

Sumber: (Satu Data Kabupaten Trenggalek, n.d.)

| No. | Kecamatan | Desa | Indeks Ketahanan Sosial (IKS) | Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) | Indeks Ketahanan Ekologi (IKL) | NILAI IDM | STATUS IDM |
|-----|------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|
| 1 | Trenggalek | Ngares | 0.9257 | 0.7 | 0.8 | 0.8086 | Maju |
| 2 | Trenggalek | Karangsoko | 0.88 | 0.8833 | 0.8667 | 0.8767 | Mandiri |
| 3 | Trenggalek | Sambirejo | 0.8629 | 0.9333 | 0.6667 | 0.821 | Mandiri |
| 4 | Trenggalek | Sumberdadi | 0.7943 | 0.5167 | 0.8 | 0.7037 | Berkembang |
| 5 | Trenggalek | Rejowinangun | 0.7771 | 0.8833 | 0.7333 | 0.7979 | Maju |
| 6 | Trenggalek | Sukosari | 0.8686 | 0.7167 | 0.6667 | 0.7506 | Maju |
| 7 | Trenggalek | Parakan | 0.8057 | 0.6833 | 0.6667 | 0.7186 | Maju |
| 8 | Trenggalek | Dawuhan | 0.7657 | 0.6833 | 0.6667 | 0.7052 | Berkembang |



Gambar I. 5 Data Grafik IDM di Kecamatan Trenggalek tahun 2022

Sumber: (Satu Data Kabupaten Trenggalek, n.d.)

Pada Gambar I. 5 menunjukkan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Desa Karangsoke dan Sambirejo merupakan dua dari delapan Desa dengan status Indeks Desa Membangun (IDM) sudah Mandiri atau Desa Sembada. Desa Karangsoke memiliki nilai IDM 0,8767 dan Desa Sambirejo memiliki nilai IDM 0,821.

Tabel I. 3 Penyaluran Dana Desa di Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek tahun 2022

(Satu Data Kabupaten Trenggalek, n.d.)

| No | Wilayah / Lokasi | Jumlah Desa | Pagu Anggaran (Dana Desa) | Total Penyaluran ke RKD | Persentase Total Penyaluran |
|----|------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | Ngares | 1 | Rp 899,622,000 | Rp 899,622,000 | 100% |
| 2 | Karangsoke | 1 | Rp 879,519,000 | Rp 879,519,000 | 100% |
| 3 | Sambirejo | 1 | Rp 855,301,000 | Rp 855,301,000 | 100% |
| 4 | Sumberdadi | 1 | Rp1,011,094,000 | Rp1,011,094,000 | 100% |
| 5 | Rejowinangun | 1 | Rp 761,859,000 | Rp 761,859,000 | 100% |
| 6 | Sukosari | 1 | Rp1,097,311,000 | Rp1,097,311,000 | 100% |
| 7 | Parakan | 1 | Rp1,015,207,000 | Rp1,015,207,000 | 100% |
| 8 | Dawuhan | 1 | Rp1,108,206,000 | Rp1,108,206,000 | 100% |
| | | 8 | Rp7,628,119,000 | Rp7,628,119,000 | 100% |

Pada tabel I. 3 menjelaskan nominal penyaluran dana desa di Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek di tahun 2022. Desa Karangsoke, mendapatkan pagu anggaran atau Pagu Dana Desa sebesar Rp 879.519.000. Nominal tersebut, terkecil ketiga di Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek setelah Desa Rejowinangun yang mendapatkan dana terkecil Rp 761.859.000, dan Desa Sambirejo yang mendapatkan dana terkecil kedua Rp 855.301.000.

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan dengan *stakeholder* desa, khususnya Kepala Desa Y, menjelaskan bahwa Desa Y dan Desa Sb sudah dikategorikan sebagai Desa Mandiri atau Sembada, namun APBDes yang diterima dari pemerintah pusat memanglah nominalnya lebih kecil daripada desa yang lain, yang masih berstatus Maju dan Berkembang. Status IDM Desa Karangsoke, yang merupakan tertinggi di Kecamatan Trenggalek sebagai Desa Mandiri atau Sembada, dianggap dapat memenuhi kebutuhan dana desanya oleh Pemerintah Pusat.

Sumber pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa, menunjukkan bentuk kemandirian dari sebuah desa dalam mengelola keuangan. Dengan demikian, pemerintah desa tidak akan bergantung pada transfer dana yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, (Sandag, Rotinsulu, & Rorong, 2022). Alokasi Dana Desa (ADD) yang besar, akan mengakibatkan kemandirian suatu desa semakin kecil atau rendah, dan berlaku sebaliknya, jika Alokasi Dana Desa (ADD) semakin kecil atau rendah, hal tersebut akan menjamin kemandirian suatu desa dapat dikatakan semakin mandiri Dengan demikian, ketergantungan pemerintah desa dengan pemerintah pusat dan daerah mengenai pendanaan akan menurun, dan dapat meningkatkan kemandirian suatu desa (Safitri & Susilowati, 2022).

Dengan proses pembangunan infrastruktur, melalui program dan proyek yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, baik proyek berskala Nasional melalui Proyek Strategis Nasional (PSN), proyek pembangunan di daerah Provinsi dan Kabupaten, hingga proyek berskala desa mempunyai *scope* dan ruang lingkungnya masing-masing. Pemerintah secara serius menangani pembangunan yang dibutuhkan masyarakat melalui infrastruktur dan fasilitas.

Fasilitas lain yang membutuhkan pembangunan proyek untuk menunjang kegiatan atau operasional ialah pada sektor Desa. Contohnya, ialah pembangunan jalan untuk menuju daerah Wisata X di Desa Y. Desa Y merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Desa Y merupakan salah satu desa mandiri atau disebut dengan desa sembada, yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk menyejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan. Prestasi akan kemajuan ini membuat *stakeholder* desa atau pemerintah desa berupaya untuk dapat memajukan sektor lain seperti pariwisata sebagai nilai jual dan memberdayakan masyarakat sekitar.

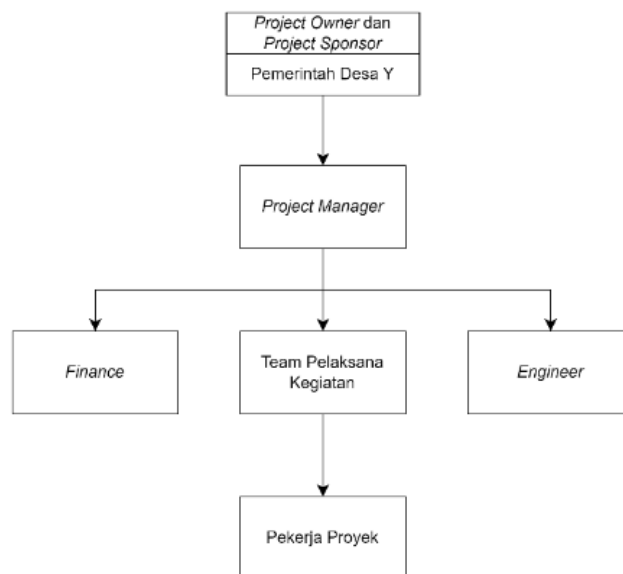
Wisata X yang memiliki potensi direncanakan akan dibangun akses jalan, untuk memudahkan akses menuju ke lokasi wisata tersebut. Wisata X yang sudah memiliki daya tarik sebagai salah satu tempat *camping* atau sekadar *tracking* di waktu libur oleh masyarakat, akan diberdayakan dan dikelola melalui pengerjaan proyek. Adapun fungsi dan kegunaan lain pembangunan proyek ini seperti untuk menghubungkan dua dusun (dusun J dan dusun S), akses untuk mengangkut hasil pertanian dan hutan masyarakat setempat, dan jalan untuk wisata *trail*.

Project manager dari pembangunan proyek menjelaskan, detail dari pembangunan proyek ialah jalan rabat beton pada daerah perbukitan. Pada tahapan pengukuran dan perencanaan proyek, proyek tersebut memiliki *volume* 250 meter x 2,5 meter x 0,12 meter. Dengan demikian, proyek rabat beton jalan tersebut direncanakan untuk pembangunan pada jalan setapak sepanjang 250 meter, dengan lebar jalan 2,5 meter, dan tinggi rabat beton 12 cm. Sementara, Kepala Desa Y menjelaskan untuk pembangunan proyek ini dianggarkan sejumlah Rp 108.656.000, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2023.

Pada pelaksanaan proyek pembangunan jalan, Desa Y mendapatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tahun 2023. Inisiasi proses pengerjaan proyek ini sudah sejak tahun 2022, melalui beberapa tahapan. Kepala Desa Y menjelaskan, pekerjaan proyek pembangunan jalan ini dimulai dari permusyawaratan dusun, dilanjutkan permusyawaratan tingkat desa, dan mulai

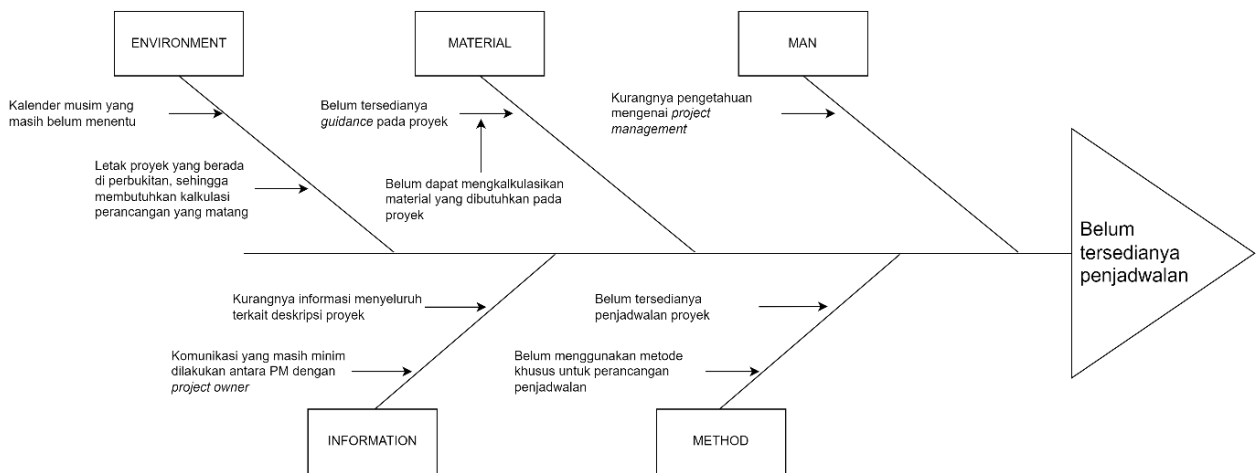
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) melalui dasar atau persyaratan Rencana Pembangunan Jarak Menengah Desa (RPJMDes) ketika Kepala Desa terpilih dilantik (pada awal periode menjabat). RPJMDes berisikan visi misi Kepala Desa terpilih untuk setiap tahun periode menjabat. Selain itu, RKPDDes juga harus berisikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Kabupaten (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Nasional. Pada tahapan akhir penyusunan RKPDDes harus memuat Rencana Pembangunan Jarak Menengah Desa (RPJMDes) untuk satu tahun mendatang (untuk pembangunan pada 2023), potret desa (kondisi lingkungan yang memerlukan pembangunan), dan kalender musim.

Saat ini tahapan atau fase proyek sedang berada di tahapan perencanaan atau *planning*. Desa Y merencanakan pembangunan proyek dimulai pada pertengahan tahun 2023, yaitu mulai pada bulan Juli. Dengan demikian, pada bulan Agustus hingga September tahun 2023 merupakan waktu untuk tahapan perencanaan persiapan dengan melakukan penyusunan dokumen proyek dan langsung dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan pada bulan September hingga November 2023. Sebelum tahapan pelaksanaan pengerjaan proyek, dibutuhkannya perancangan penjadwalan sebagai acuan atau *guidance* dalam pengerjaan proyek nantinya.



Gambar I. 6 Struktur Bagan Proyek

Dari gambar I.6 di atas, diketahui bahwa Pemerintah Desa Y bertindak menjadi *project owner* sekaligus *project sponsor* untuk melaksanakan pekerjaan proyek ini. Pada struktur organisasi tersebut, sebelum menunjuk *project manager* (PM) untuk dapat melaksanakan proyek, maka dibutuhkan ahli dalam menghitung kalkulasi kebutuhan untuk pelaksanaan proyek. Hal tersebut, sesuai dengan peraturan APBDes Desa Y pada tahun 2023, untuk dapat mengkalkulasikan perkiraan anggaran yang akan dibutuhkan. Dengan demikian, akan memudahkan pembagian anggaran dana pada sektor lain dan tidak hanya terfokus dalam proyek pembangunan jalan.



Gambar I. 7 *Fishbone Diagram*

Pada gambar I. 7 dijelaskan, mengenai hasil *interview* atau wawancara dengan *stakeholder* desa khususnya Kepala Desa Y. Hasil wawancara tersebut disajikan dalam bentuk *fishbone diagram* untuk memudahkan proses penelitian. Kepala Desa Y menjelaskan dalam proses wawancara, ada beberapa faktor utama yang dibutuhkan dalam perancangan dan pelaksanaan proyek, yaitu *time scheduling* yang masih belum terlalu dimengerti oleh tim proyek, dan ketepatan waktu untuk pengerjaan proyek karena berhubungan dengan kalender tahun di mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah dibagi dalam tahun tersebut. Sementara itu, ada beberapa faktor permasalahan mengenai proyek yang dikeluhkan. Beberapa faktor yang disampaikan oleh Kepala Desa T dikelompokkan menjadi beberapa faktor, diantaranya *man*, *material*, *environment*, *method*, dan *information*.

Setelah dilakukan analisis mengenai beberapa permasalahan yang ditimbulkan pada proyek pembangunan jalan di Desa Y, selanjutnya dijabarkan permasalahan yang menyebabkan belum tersedianya penjadwalan yang mendetail proyek. Data tersebut disajikan dalam *fishbone diagram*, dan mendapatkan beberapa permasalahan meliputi *man*, *material*, *method*, dan *information*. Pada bagian *man*, dijelaskan bahwa kurangnya pengetahuan mengenai metode dalam *project management*. Sementara itu, pada bagian *material*, belum tersedianya *resource management plan*, berupa *material physic* dan *material human* yang berhubungan dengan faktor *man* atau pekerja proyek. *Resource management plan* tersebut tentunya akan berguna terlebih untuk dapat menjalankan proses lain yaitu *estimates activity resource*, dan proses dalam fase *executing* pada proyek. Faktor *environment* juga mempengaruhi permasalahan, dikarenakan tidak menentukannya kalender musim (faktor cuaca), serta lahan pengerjaan proyek yang berada di daerah perbukitan atau tanah miring. Pada bagian *method*, berhubungan dengan faktor utama permasalahan pada proyek ini, yaitu belum tersedianya penjadwalan pada proyek. Penjadwalan tersebut tentunya dapat dijadikan sebagai acuan dalam fase *executing* pada proyek nantinya. Pada faktor *information*, minimnya komunikasi antara *project owner* dengan *project manager* yang terjalin.

I.2 Alternatif Solusi

Setelah dilakukan analisis mengenai permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan menuju Wisata X di Desa Y, dibutuhkan solusi yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi agar proyek dapat berjalan dengan optimal. Berdasarkan gambar I.2, dijabarkan bahwa permasalahan yang dihadapi pada pengerjaan proyek tersebut ialah belum tersedianya penjadwalan pada proyek. Adapun alternatif solusi yang dapat disampaikan:

Tabel I. 4 Identifikasi Alternatif Solusi

| No | Akar Permasalahan | Solusi |
|----|--------------------------------------|---|
| 1. | Belum tersedianya penjadwalan proyek | Perancangan penjadwalan pada proyek menggunakan <i>critical path method</i> (CPM) |

| No | Akar Permasalahan | Solusi |
|----|---|---|
| 2. | Belum tersedianya <i>guidance</i> mendetail mengenai material yang dibutuhkan | Perancangan <i>resource management plan</i> sebagai <i>guidance</i> berdasarkan PMBOK 6 th Edition |
| 3. | Belum adanya detail yang dibutuhkan untuk pengerjaan dari proyek | Perancangan kelengkapan dokumen proyek yang dibutuhkan secara mendetail |

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Desa Y, penulis melakukan penelitian untuk penelitian tugas akhir dengan judul “PERANCANGAN PENJADWALAN PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN MENUJU WISATA X DI DESA Y MENGGUNAKAN METODE *CRITICAL PATH METHOD*”. Dengan adanya penjadwalan secara mendetail, diharapkan dapat membantu *Project Manager* dan Desa Y dalam proses pengerjaan proyek pembangunan jalan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan lain seperti adanya keterlambatan.

I.3 Rumusan Masalah

Berikut merupakan rumusan masalah berdasarkan permasalahan yang dihadapi:

1. Bagaimana hasil perancangan penjadwalan pada pengerjaan proyek pembangunan jalan di Desa Y menggunakan *critical path method*?
2. Apa saja aktivitas kritis dalam perancangan penjadwalan pada pengerjaan proyek pembangunan jalan di Desa Y?

I.4 Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan dari penelitian untuk menjawab permasalahan yang dihadapi:

1. Untuk mengetahui hasil perancangan penjadwalan pada pengerjaan proyek pembangunan jalan di Desa Y menggunakan *critical path method*.
2. Untuk mengetahui aktivitas kritis dalam perancangan penjadwalan pada pengerjaan proyek pembangunan jalan di Desa Y.

I.5 Manfaat Penelitian

Berikut merupakan manfaat penelitian:

1. Penelitian dapat bermanfaat mengenai keilmuan *Project Management* khususnya dalam hal penjadwalan atau *schedule*.
2. Penelitian dapat bermanfaat untuk mengetahui aktivitas pada proyek.
3. Penelitian dapat bermanfaat dan membantu dalam perancangan penjadwalan proyek secara optimal.
4. Penelitian dapat bermanfaat untuk mengetahui aktivitas kritis pada proyek.
5. Penelitian dapat bermanfaat untuk mengetahui urutan atau tahapan aktivitas yang akan dilakukan pada proyek.
6. Penelitian dapat bermanfaat sebagai acuan atau *guidance* dalam proses pengerjaan proyek.
7. Penelitian dapat bermanfaat untuk meminimasi adanya keterlambatan pada proses pengerjaan proyek.
8. Penelitian dapat bermanfaat bagi *stakeholder project* untuk pengerjaan proyek lainnya.
9. Penelitian dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya.

I.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian dan penyusunan tugas akhir disampaikan dalam enam bab, dan setiap bab akan memiliki pembahasan sesuai dengan kerangka laporan penyusunan tugas akhir. Adapun, sistematika penulisan pada penyusunan tugas akhir sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab I menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian untuk mengidentifikasi akar permasalahan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab II menjelaskan tentang teori dan referensi terkait untuk menunjang penyelesaian masalah dan penyusunan tugas akhir.

BAB III Metodologi Penyelesaian Masalah

Bab III menjelaskan tentang penyelesaian masalah, identifikasi sistem terintegrasi, batasan, dan asumsi penelitian.

BAB IV Pengumpulan dan Pengolahan Data

Bab IV menjelaskan tentang tahapan pengumpulan data berupa jenis data yang dibutuhkan, standar rancangan, proses rancangan dan tahapan pengolahan data yang dilakukan berdasarkan metodologi yang telah dipilih untuk menghasilkan hasil rancangan.

BAB V Analisis

Bab V menjelaskan tentang proses verifikasi dan validasi data serta dilakukan analisis data setelah melakukan proses pengolahan data mengenai rancangan tugas akhir.

BAB VI Kesimpulan dan Saran

Bab VI menjelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan serta saran untuk penelitian selanjutnya.